BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perkeretaapian Indonesia

2.1.1 Zaman Kolonial Belanda (1864-1942)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh "Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij" (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada Hari Sabtu, 10 Agustus 1867. Keberhasilan NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api didaerah lainnya. Tidak mengherankan, jika pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Jika tahun 1867 baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 km. Selain di Jawa, pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 Km antara Makasar - Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya di Ujung pandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum

sempat dibangun, studi jalan kereta api Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia mencapai 6.811 km.

2.1.2 Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Zaman pendudukan jepang, seluruh jaringan kereta api pada pemerintahan belanda dikuasai oleh jepang dan diberi nama RYUKU KYOKU yang kemudian berubah nama menjadi TEDSUDO KYOKU yang berkantor pusat di bandung. Sedangkan perkeretaapian di Sumatra disebut TEDSUDO TAI dan berkantor pusat di bukit tinggi. Berbeda halnya dengan zaman pemerintahan belanda, seluruh kegiatan perkeretaapian pada zaman jepang dimaksudkan dalam rangka mendukung usahanya memenangkan perang, dimana lintas-lintas cabang dan rel sebagian dibongkar dan dialihkan dari Indonesia untuk pemasangan lintas Thailand-myanmar, kemudian bengkel-bengkel perkeretaapian sebagian dijadikan bengkel alat-alat perang atau militer.

Pengolahan tersebut meliputi:

a. Daerah jawa dibawah pimpinan angkatan darat (tedsudo kyoku) dibagi kedalam 3 daerah, yaitu:
    1) Bagian barat (sebu kyoku),
    2) Bagian tengah (khubu kyoku),
    3) Bagian timur (tobu kyoku).

b. Masing-masing daerah tersebut dibagi kedalam beberapa daerah eksploitasi yang berdiri sendiri dan dikepalai oleh kepala inspeksi (zimushotyo), meliputi:

    1) Aceh dan SDM (sumatera tedsudo),
    2) Sumatera barat (soibu sumatera tedsudo),
    3) Sumatera selatan (nanbu sumatera tedsudo)

2.1.3 Zaman Pemerintahan Republik Indonesia (1945-sekarang)

Setelah proklamasi kemerdekaan republik Indonesia tanggal 17 agustus 1945, penguasaan perkeretaapian mulai beralih ke tangan pemerintah indoesia. Pada tanggal 28 sepember 1945 didirikanlah djawatan kereta api Indonesia (DKAI) sebagai perusahaan kereta api pertama setelah pengalihan Indonesia. Pada masa ini banyak kesulitan dan hambatan yang mengakibatkan timbulnya kelemahan di berbagai aspek usaha. Para pemuda kereta api yang tergabung dalam angkatan muda kereta api (AMKA) melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan perkeretaapian di tanah air.Pada tanggal 27 september 1949 pemerintah republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah no. 2 yang isinya menyatakan bahwa djawatan kereta api Indonesia (DKARI) dan staat spoorwagen (SS) digabungkan menjadi djawatan kereta api (DKA). Kemudian tanggal 25 mei 1963 berdasarkan peraturan pemerintah no. 22 tahun 1963 status perkeretaapian berubah dari djawatan kereta api (DKA) menjadi perusahaan Negara kereta api (PNKA).

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 61, pada tanggal 15 september 1971 perusahaan Negara kereta api (PNKA) dan selanjutnya berdasarkan

keputusan presiden No. 44 tahun 1974, PJKA merubah unit organisasi dalam lingkungan departemen perhubungan dimana kedudukan, fungsi, tugas, dan susunan organisasi diatur berdasarkan keputusan presiden. Selanjutnya dalam peraturan pemerintah No. 57 tahun 1991 terhitung mulai tanggal 2 januari 1991 PJKA telah berubah status menjadi perusahaan umum kereta api (PERUMKA), yang artinya seluruh kepemilikan dikuasai oleh Negara. Selaras dengan modernisasi perkeretaapian dalam kaitannya dengan system transportasi nasional dan guna menghadapi persaingan usaha, maka PERUMKA dituntut untuk mampu meningkatkan kondisi perusahaan dari semua sektor yang ada kearah yang lebih baik. Oleh karena itu PERUMKA berusaha menekan segala kerugian yang terjadi dengan berusaha meningkatkan produktivitas kereta api dengan menggunakan peralatan secara optimal sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1998 terhitung sejak tanggal 1 juni 1999 perusahaan kereta api telah dialihkan usahanya oleh pemerintah dari PERUMKA menjadi PT kereta api dengan bentuk persero.

Pemerintah mengharapkan dengan perubahan status ini akan mampu meningkatkan kinerja usaha kereta api kearah yang lebih baik lagi guna menunjang pembangunan nasional, khususnya dibidang transportasi, selain itu sebagai upaya untuk mempersiapkan perusahaan untuk go public. Dengan pengalihan bentuk tersebut maka PERUMKA dinyatakan bubar pada saat pendirian perseroan tersebut, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban,kekayaan serta pegawai PERUMKA yang pada saat pembubarannya beralih kepada perusahaan perseroan tersebut.

Dengan berubahnya PERUMKA dari perusahaan umumm menjadi persero,PT.kereta api di tetapkan sebagi:

1. Penyelenggaran angkutan orang dan barang dengan kereta api.
2. Melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.
3. Pengusaha dari usaha penunjang prasarana dan sarana kereta api.

Meskipun perusahaan telah beralih status menjadi PT namun urgensi pelayanan kepada masyrakat masih akan tetap di pertahankan.

2.1.4 Visi dan Misi PT.Kereta Api Indonesia

- **Visi**

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus dalam pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.

- **Misi**

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjanngannya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama :

1. keselamatan
2. ketepatan waktu
3. pelayanan
4. kenyamanan

2.1.5 Logo PT.Kereta Api Indonesia (Persero)



Gambar 2.1

Logo PT.Kereta Api (Persero)

Tabel 2.1

Tabel Kronologis Bentuk Perusahaan

PERIODE	STATUS
1864	Pembangunan jalan kereta api sepanjang 26 km antara kejimen sampai tagung oleh Hindia-Belanda.
1864-1945	Staat spoorwegen (SS),Verenigde spoorwegenbedrif (VS),Deli spoorwegen masthapijh (DSM).
1945-1950	Djawatan Kereta Api
1950-1963	Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI)
1963-1971	Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA)
1971-1991	Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA)
1991-1998	Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)
1998-sekarang	PT.Kereta Api Indonesia(Persero)

2.2 Struktur Organisasi & Uraian Jabatan Perusahaan

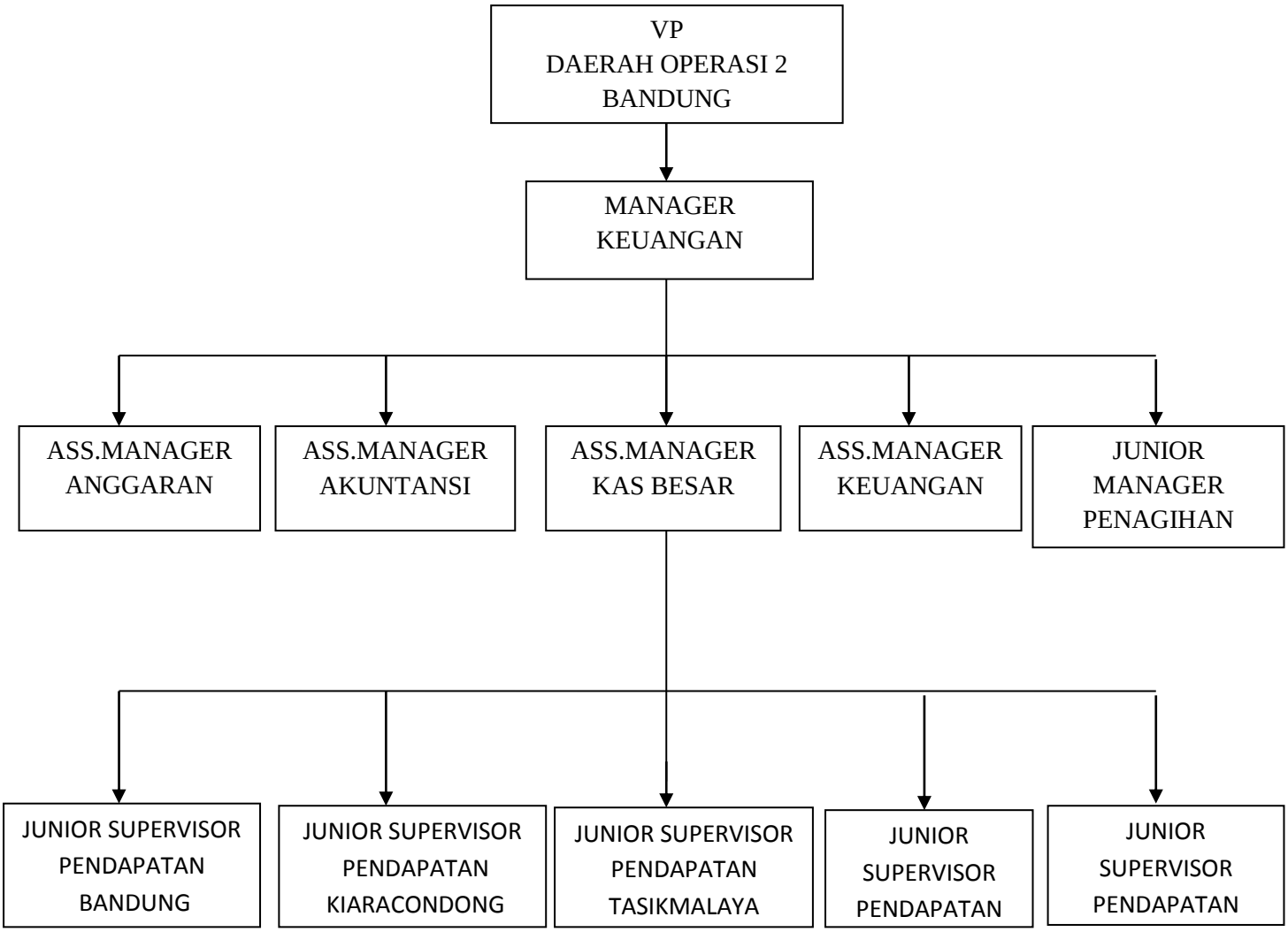
PT. Kereta Api (Persero) mempunyai struktur organisasi Lini dan staff dimana terdapat hubungan wewenang dan garis antara atasan dan bawahan, atasan dapat memberi perintah kepada bawahan dan dapat mengambil keputusan, begitu juga lini bawahannya dapat member perintah kepada bawahannya dan seterusnya.

Sedangkan staff disini berfungsi memberi saran, nasehat atau anjuran baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka pengembangan perusahaan. Staff tidak mempunyai wewenang untuk memberikan perintah.

Struktur organisasi dan tata kerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM 8 tahun 1991 tanggal 19 Februari 1991, berdasarkan keputusan tersebut susunan organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dibagi kedalam empat tingkat yang terdiri dari:

1. Tingkat pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan pembinaan manajerial.
2. Tingkat wilayah usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional.
3. Tingkat daerah operasi mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional.
4. Tingkat unit pelaksanaan (UPT), mempunyai tugas dalam melaksanakan langsung kegiatan operasional dan pelayanan jasa angkutan kereta api

2.2.1 Struktur organisasi seksi keuangan sub seksi anggaran dan akuntansi



Gambar 2.2

Struktur organisasi seksi keuangan sub anggaran dan akuntansi

2.3 Uraian Jabatan

2.3.1 Uraian Jabatan PT. Kereta Api (Persero) DAOP II Bandung

Sesuai dengan keputusan direksi No.Kep. U/OT.003/XI/2KA-2002 , susunan PT. Kereta Api (Persero) tingkat pusat adalah sebagai berikut:

a. Direksi

Tugas pokoknya adalah:

1. Memimpin, mengurus, dan mengelola PT. Kereta Api (Persero) sesuai dengan tujuan dan tugas pokok perusahaan.
2. Mengawasi, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan.
3. Mewakili perusahaan didalam dan diluar peradilan.
4. Melaksanakan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Menteri.
5. Merumuskan dan menetapkan perumusan kebijaksanaan.
6. Menyiapakan pada waktunya rencana kerja tahunan lengkap dengan anggaran PT. Kereta Api (Persero).
7. Menyiapkan laporan pertanggung jawaban PT. Kereta Api (Persero) dan perhitungan hasil usaha menurut cara waktu yang telah ditetapkan Menteri.
8. Menyiapka susunan organisasi lengkap dengan perincian tugas.
9. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi PT. Kereta Api (Persero).
10. Menetapkan peraturan gaji, pension, atau jaminan hari tua dan penghasilan bagi pegawai serta semua hal kepegawaian lainnya.
11. Memberi segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PT. Kereta Api (Persero), baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala.

12. Menjalankan kewajiban-kewajiban lain berdasarkan petunjuk Menteri.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan dan pengelolaan kegiatan – kegiatan PT. Kereta Api (Persero) secara terpadu.
2. Pengusahaan dan pengembangan prasarana serta sarana angkutan kereta api.
3. Pengembangan dan pendayagunaan SDM.
4. Pengembangan organisasi dan manajemen PT. Kereta Api (Persero).
5. Pengelolaan keuangan PT. Kereta Api (Persero).
6. Pengawasan internal.

b. Direktur Utama

Tugas dan Wewenangnya :

1. Pembuat dan pemberi masukan pertimbangan dan sarana untuk kebijakan teknis.
2. Bertindak untuk dan atas nama baik direksi dan semua bidang.
3. Memimpin kegiatan direktorat.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan direksi.

2.3.2 Uraian Jabatan Seksi Keuangan, Sub Seksi Anggaran dan Akuntansi

Selain itu, direktorat atau bagian yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) berikut sub direktoratnya sebagai berikut :

1. Bagian Satuan Pengawas Intern (SPI)

Tugas bagian SPI adalah melakukan pengawasan manajemen, pengujian, penilaian atas hasil laporan serta pengusutan atas perintah Direktur Utama

menyangkut bidang keuangan, bagian teknis pemeliharaan prasarana, bagian operasi dan pemasaran , pelayanan jasa angkutan kereta api, bidang administrasi personalia, administrasi umum dan administrasi pendidikan serta pelatihan, bidang perencanan penelitian teknologi informasi dan dan sistem informasi serta bidang kelengkapan.

2. Bagian Pusat Perencanaan dan pengembangan (Pusrenbang)

Tugas dan wewenangnya:

a. Perencanaan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

b. Perencanaan dan pembangunan kurikulum serta pembinaan instruktur.

3. Direktorat Teknik

Direktorat teknik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana yang berkaitan dengan perolehan dan pendayagunaan, pemeliharaan serta perawatan atas sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang dimiliki perusahaan.

Direktorat terdiri dari :

a. Sub Direktur Perencanaan teknik.

b. Sub Direktur Jalan Rel dan Jembatan.

c. Sub Direktorat Tanah dan Bangunan

d. Sub Direktorat sinyal, Telekomunikasi dan Listrik.

4. Direktorat Operasi dan Pemasaran

Direktorat operasi dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan teknik operasi jasa angkutan kereta api serta pendayagunaan fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya.

Direksi Operasi dan Pemasaran terdiri dari :

a. Sub Direktorat lalu lintas.

b. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan penumpang.

c. Sub Direktorat Pemasaran Angkutan Barang.

5. Direktorat Keuangan

Direktorat keuangan mempunyai tugas pokok membina dan mngelola keuangan dan ketersediaan, serta menetapkan kebijakan pendanaan, pendayagunaan keungan, akuntansi dan sediaan.

a. Sub Direktorat Anggaran Sub Direktorat Keuangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun program anggaran, mengkoordinasi dan memadukan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP), pelaksanaan otoritas, pelaporan, pelaksanaan RKAP serta perhitungan PSO, IMO, TAC.

   Sub Direktorat Anggaran terdiri dari :

   1. Seksi Anggaran I.
   2. Seksi Anggaran II.
   3. Seksi Anggaran III.
   4. Seksi Anggaran IV.

b. Sub Direktorat Administrasi Keuangan Sub Direktorat Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan mengelola atas usaha kas besar kantor pusat, melaksanakan evaluasi pembayaran internal dan eksternal, mengendalikan dan mendistribusikan dana, serta

mendayagunakan kas perusahaan, menyelesaikan administrasi asuransi serta memamntau penyaluran dan PUKK.

Sub Direktorat Administrasi Keuangan terdiri dari:

1. Seksi Bendahara kantor pusat.
2. Seksi pelaksanaan pembayaran.
3. Seksi pengendalian dan pendayagunaan kas perusahaan.
4. Seksi asuransi dan PUKK.

c. Sub Direktorat Akuntansi Sub Direktorat Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan dan menyusun akuntansi umum, akuntansi biaya, akuntansi verifikasi kas, akuntansi pendukung dan perpajakan.

a. Kepala Kelompok I (KapokI)

Kelompok penyelenggara anggaran mempunyai tugas pokok :

1) Penyusunan rencana kerja dan Anggaran (RKA).
2) Pengendalian perencanaan pelaksanaan anggaran.
3) Menerbitkan surat otorisasi NPD (Nota Permohonan Dana).
4) Menyusun laporan realisasi anggaran.

b. Kepala Kelompok II (kapok II) Kelompok penyelenggara verifikasi serta akuntansi pendapatan dan pengeluaran mempunyai tugas pokok:

1) Verifikasi meneliti kelengkapan, kebenaran serta keabsahan yang berkenaan dengan pengeuaran dan pendapatan Daop II Bandung.

2) Akuntansi Pendapatan, penerimaan dan pengeluaran Kas, meneliti kelengkapan analisa dokumen lainnya yang diterima dari unit-unit

pelaksana, mengikhtisarkan analisa stasiun, membuat bukti jurnal dan menyelenggarakan buku pembantu yang bersangkutan dengan pengeluaran dan pendapatan Daop 2 Bandung.

c. Kepala Kapok III (kapok)

Kelompok penyelenggara akuntansi biaya, persediaan dan aktiva tetap mempunyai tugas pokok:

1) Pembiayaan dan dokumentasi lainnya yang diterima dari unit-unit pelaksanaan menyangkut akuntansi biaya.

2) Menyusun buku pembantu atas mutasi – mutasi terhadap aktiva tetap.

d. Kepala Kelompok IV (kapok IV)

1) Proses komputerisasi akuntansi.

2) Penyelenggaraan buku besar.

3) Pembuatan daftar sisa.

4) Penyusun neraca lajur.

5) Pembuatan jurnal khusus.

6) Pelaksanaan rekonsiliasi hubungan pembukuan.

7) Penyelidikan terhadap angka akun yang tidak wajar pada neraca lajur yang akan dituangkan dalam laporan keuangan Daop 2 Bandung.

8) Pembuatan laporan berkala ikhtisar dukungan laporan keuangan

2.4 Aktivitas Perusahaan

2.4.1 Kegiatan Perusahaan

PT. Kereta Api (Persero) yang bergerak di bidang usaha transportasi perkeretaapian, adapun bidang usaha perusahaan adalah penjualan atau pemasaran jasa angkutan berupa :

1. Angkutan Penumpang Jenis angkutan penumpang :

a. KA Jabotabek dan KA Lokal.

b. KA Penumpang Ekonomi.

c. KA Penumpang Bisnis.

d. KA Penumpang Eksekutif.

2. Angkutan Barang Angkutan barang terdiri dari :

a. Angkutan negosiasi yang terdiri dari : Angkutan baja dari Cilegon ke Waru, angkutan BBM dari Rewulu ke Madiun, angkutan Perkebunan di ESU, angkutan batu bara di ESB dan Surabaya.

b. Angkutan Non Negosiasi Angkutan petik kemas dan KA. Barang cepat.

2.4.2 Tujuan PT. Kereta Api (Persero)

Adapun tujuan dari PT. Kereta Api (Persero) sebagai berikut :

1. Turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya di bidang transportasi.
2. Mendukung penyediaan barang/jasa di bidang perkeretaapian yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di pasar domestik maupun mancanegara.

3. Meningkatkan kemampuan perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian, serta menyelenggarakan usaha penunjang bidang sarana dan prasarana kereta api dan bermanfaat umum dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.